

ISLAM DAN BIROKRASI

Oleh Nurcholish Madjid

Barangkali tidak terlalu berlebihan jika dikatakan bahwa umat Islam Indonesia meninggalkan tahun 1991 dengan banyak kenangan manis dan harapan yang meningkat untuk masa yang segera mendatang. Dan di antara berbagai kenangan itu ialah Festival Istiqlal, yang sungguh unik dari beberapa segi. Dia unik sebagai yang pertama dari jenisnya, yaitu jenis kegiatan nasional yang dengan tulus menampilkan berbagai aspek budaya keagamaan. Dia juga unik dari segi bahwa keterlibatan pemerintah dan birokrasi sedemikian jauhnya sehingga dengan mudah dapat ditafsirkan sebagai gejala baru negeri ini yang mengarah kepada pengakuan sejati akan pentingnya budaya keagamaan dalam kehidupan bernegara. Dan tentu dia juga unik karena dirancang sebagai bagian dari kegiatan yang dikaitkan dengan kegandrungan nasional tahun 1991, sebagai Tahun Kunjungan Indonesia.

Festival Istiqlal itu juga mengingatkan kita akan adanya anomali tertentu dalam hubungan antara susunan kemapanan resmi negara (birokrasi) dan umat Islam (sebagian terbesar rakyat). Anomali pertama tersimpulkan dari perkataan “Istiqlal” itu sendiri. Perkataan Arab ini dikenal umum sebagai nama sebuah masjid yang megah di ibu kota. Tapi mungkin tidak banyak yang menyadari bahwa “Istiqlal” artinya “Kemerdekaan”, dan masjid itu didirikan untuk memperingati kemerdekaan nasional kita. Dan sebelumnya, di Yogya, ibu kota revolusi, telah terlebih dahulu berdiri Masjid Syuhada’, sebagai monumen-monumen bangsa,

dengan sendirinya melambangkan adanya peranan amat penting, jika bukannya terpenting, dari umat Islam dalam perjuangan untuk kemerdekaan. Tapi jika kita melihat diorama di kaki “Monumen Nasional” yang menggambarkan perjalanan perjuangan bangsa, kita akan mendapatkan hal-hal yang kurang sinkron. Seorang ahli Indonesia Amerika pernah menyatakan kepada saya keheranannya, bahwa diorama itu terasa sekali mengingkari umat Islam dalam perjuangan bangsa. Bahkan ada bagian-bagian yang dengan mudah dapat ditafsirkan sebagai usaha menampilkan kesan yang tidak begitu positif.

Keheranan serupa dirasakan oleh banyak orang lain. Dan lepas dari soal apakah absah atau tidak, adanya keheranan itu mencerminkan problematik hubungan antara kaum Muslim Indonesia dan susunan mapan kenegaraan, dan sebaliknya. Problematik itu kira-kira ada di sekitar masalah legitimasi kekuasaan pemerintah atau negara itu sendiri. Semua orang tahu bahwa masalah itu menyangkut perbedaan pandangan dari sebagian politikus Muslim mengenai dasar negara. Akibatnya ialah timbulnya kelompok kalangan Muslim yang merasa “tidak terwakili”. Mudah dilacak bahwa deprivasi politik ini berujung pada sikap-sikap oposisionalistik.

Dalam interaksinya dengan berbagai pihak, oposisionalisme itu pun dengan sendirinya menghasilkan akibatnya tersendiri. Maka, seperti menjadi pandangan sebagian kalangan politikus Muslim, ada dari kalangan susunan mapan (sebut saja “oknum”, tapi cukup banyak) yang secara halus ataupun kasar berusaha menghalangi tampilnya Islam di bidang kenegaraan, atau sekurang-kurangnya berusaha melemahkan citranya. Dan karena sarat emosi, akibat-akibat interaksi yang tidak masuk akal pun muncul. Misalnya, banyak orang yang masih ingat adanya geger kepati di DPR pada tahun 1970-an hanya gara-gara adanya usul agar ungkapan “Tuhan Yang Mahaesa”, konon untuk “secara murni dan konsekuen” mengikuti ketentuan kebahasaan yang benar. Bayangkan, kalangan sangat luas kaum Muslim menanggapi usul itu sebagai usaha mengubah Tauhid menjadi Syirik, karena yang kita agungkan tidak

lagi Tuhan yang sebenarnya, melainkan “mahesa”, alias “kerbau” (dan sekarang kalangan cukup luas juga memperhatikan dengan penuh pertanyaan, mengapa pers tertentu selalu menulis “orang Muslim” dengan huruf “m” kecil, dan bukannya “orang Muslim” dengan huruf “M” besar seperti kebiasaan yang sudah lama ada, sebagai “idiom” bahasa kita, sama dengan “orang Hindu”, “orang Budha”, “orang Kristen”, dan seterusnya).

Kegagalan melihat perkara itu secara tepat akan menjadi permulaan rentetan berbagai kegagalan yang lain. Dari kerangka penglihatan inilah kita bisa lebih menghargai jasa para pribadi perintis jalan yang berani, seperti untuk menyebut beberapa orang saja Jenderal Alamsyah, Munawir Sjadzali, KH Ahmad Siddiq (almarhum), Prof Harun Nasution. Jenderal Alamsyah secara amat menentukan ikut meratakan jalan bagi terhapusnya masalah legitimasi kekuasaan dan kenegaraan kita. Hasilnya antara lain tercermin dalam, keberanian KH Ahmad Siddiq untuk dengan teguh menyatakan bahwa bentuk ideologis formal kenegaraan sekarang ini harus diterima sebagai “final”. Munawir, bersatu dengan beberapa tokoh lain, mewujudkan akibat logis itu semua dalam dataran struktural formal. Dan Prof Harun Nasution kurang lebih merupakan tokoh yang paling berjasa untuk berkembangnya semangat akademis bebas yang kreatif dalam lingkungan para intelektual keagamaan Islam. Semuanya itu, bersama banyak sekali faktor lain, menghasilkan apa yang disinggung tadi sebagai peristiwa kenangan bagus untuk yang baru silam dan harapan baik untuk yang segera mendatang, dalam hubungan antara birokrasi dan Islam.

Walaupun begitu, jika salah mempersepsinya, baik dari pihak birokrasi maupun pihak Islam, gejala-gejala yang semula positif itu dapat dengan mudah berubah menjadi semacam sinyal palsu, dan membuat pihak masing-masing kecewa dan *kecele*, misalnya kalau salah satu dari pihak-pihak yang bersangkutan menaruh harapan yang berlebihan kepada orang lain. Karena itu, seperti halnya dengan semua masalah nasional yang peka, persoalan birokrasi dan Islam

harus ditangani dengan tingkat pengertian yang memadai. Salah satu cara mendekati permasalahannya ialah dengan menilainya dari sudut pandang bahwa kita adalah bangsa yang sedang tumbuh. Proses pertumbuhan itu masih akan terus berlangsung, untuk menuju kepada tingkat perkembangan keindonesiaan yang salah satu kualitas utamanya ialah “pertimbangan baru”. Kita tidak perlu membayangkan keadaan yang serba ideal, namun jelas ada suatu keadaan keindonesiaan menyeluruh yang secara realistis akan lebih baik daripada keadaannya sekarang.

Untuk mengambil contoh yang paling mudah, dan yang secara nisbi juga kurang peka (sehingga tidak akan banyak menyinggung perasaan orang lain), namun sangat penting, dapat kita sebut masalah kebahasaan. Indonesia adalah bangsa baru yang paling sukses dalam membina dan menggunakan bahasa nasional itu diangkat dari bahasa “minoritas” (dari segi jumlah pemakai aslinya), yaitu bahasa Melayu Riau. Dan lebih menarik lagi dalam Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda 1928 yang bersejarah itu, menurut Prof Takdir Alisjahbana, peserta yang paling kukuh menghendaki agar bahasa Melayu yang diangkat sebagai bahasa nasional ialah para peserta dari kalangan pemuda suku Jawa. Mereka ini tidak menghendaki bahasa Jawa sebagai bahasa kebangsaan karena, menurut Prof Takdir lagi, mereka sadar bahasa Jawa terlalu feodalistis sehingga tidak cocok sebagai dukungan Indonesia modern yang salah satu kualitasnya ialah semangat persamaan (egalitarianisme). Meskipun bahasa Jawa secara literer jauh lebih kaya daripada bahasa Melayu, bahasa Melayu jauh lebih mampu mendukung nilai-nilai kemodernan. Sebagai bahasa perdagangan inter insuler dan mewakili budaya pantai, bahasa Melayu lebih terbuka dan dinamis daripada bahasa Jawa yang agraris dan mewakili kecanggihan budaya pertanian tanah-tanah pedalaman yang subur.

Jadi, untuk Indonesia modern, pilihan kepada bahasa Melayu sebagai bahasa nasional adalah berkah. Namun, di sinilah muncul permulaan masalah perimbangan. Karena bahasa Melayu adalah

bahasa Sumatera, salah satu akibatnya ialah adanya peranan yang besar dan dominan dari para cendekiawan asal Sumatera dalam pembinaan dan pengembangannya. Seperti diwakili oleh tokoh Takdir Alisjahbana, para intelektual asal Minangkabau—oleh keunggulan relatif dari pendidikan modern mereka pada zaman Belanda—mengisi barisan terdepan dalam pengembangan bahasa nasional. Selanjutnya suku-suku Melayu dan Minang adalah suku yang telah mengalami proses Islamisasi berat. Karena itu, khazanah kultural mereka ada dalam khazanah kultural Islam, sehingga idiom-idiom mereka pun adalah idiom Islam. Maka, dalam menjalankan peran sebagai pengembang utama bahasa Nasional, mereka dengan sendirinya banyak mengacu kepada khazanah kultural yang berat Islam. Ini meninggalkan ciri-ciri permanen tertentu pada bahasa kita. Ciri-ciri keislaman itu dicerminkan dalam “nomenklatur” resmi perpolitikkan kita, terbukti dari ungkapan berita fiktif seperti ini: Wakil-wakil rakyat dalam Dewan dan Majelis, bersama ahli-ahli dari Mahkamah dan Kehakiman, secara musyawarah mufakat membahas masalah hak-hak asasi, hukum, ketertiban umum dan keamanan sebagai syarat mutlak terwujudnya masyarakat adil makmur, dan hasilnya melalui maklumat resmi disiarkan ke daerah-daerah dan wilayah-wilayah. Dengan sedikit saja kenal pada khazanah budaya Islam, orang tahu bahwa semua kata dalam ungkapan itu, kecuali kata-kata penghubungnya, berasal dari bahasa Arab (barangkali untuk banyak orang tidak begitu jelas bahwa kata “resmi” berasal dari “*rasm*”, “siar” dari “*syi‘ār*”).

Jadi, terdapat dominasi budaya Sumatera, dan kenyataan ini, menjadi masalah perimbangan keindonesiaan yang lebih menyeleruh. Lalu tiba-tiba, dalam tahun-tahun terakhir ini, nyaring terdengar teriakan keluhan terjadinya “Jawanisasi” bahasa nasional. Malah seorang ahli bahasa Melayu Indonesia dari Malaysia mengancam akan meninggalkan bahasa itu jika terus-menerus dibiarkan mengalami “Jawanisasi”. Di sinilah relevansinya apa yang telah dikatakan di atas, yaitu perlunya wawasan yang mampu melihat

gejala itu sebagai bagian dari proses pertumbuhan nilai-nilai dan pranata-pranata keindonesiaan kita menuju perimbangan baru.

Apa yang dinamakan “Jawanisasi” itu tidak lain ialah gejala pertumbuhan bahasa nasional kita dari pola Sumatera ke pola Jawa, akibat peranan yang meningkat dari kalangan para pendukung budaya rumpun Jawa (Sunda, Jawa, Madura, dan Bali). Mereka adalah kelompok etnis yang kalangan intelektualnya pada masa pra kemerdekaan lebih fasih berbicara Belanda ketimbang bahasa Melayu (sampai kini pun sisa kenyataan itu masih tampak, yaitu dalam apa yang secara pejoratif “bahasa pejabat”, berupa pengucapan bahasa Indonesia dengan aksen atau sintaks yang tidak begitu absah, karena birokrasi negara kita memang sebagian besar masih diisi oleh sisa atau kelanjutan kelompok yang dahulu tidak akrab dengan bahasa Melayu tersebut). Khazanah kultural mereka ini ada dalam budaya klasik yang kebanyakan diungkapkan melalui kata-kata pinjaman dari bahasa Sansekerta (seperti tercermin pada nomenklatur para dalang). Maka, dalam memberi kontribusi kepada pertumbuhan bahasa nasional, sebanding dengan para cendekiawan Melayu Minang yang banyak menoleh ke perbendaharaan Arab, para cendekiawan Sunda, Jawa, Madura, dan Bali, khususnya Jawa, banyak menoleh ke perbendaharaan Sansekerta. Inilah salah satu sumber teriakan “Jawanisasi” tersebut.

Tetapi jika kita melihatnya sebagai bagian dari proses dinamis pertumbuhan keindonesiaan, kita akan tahu bahwa “ayunan pendulum” perkembangan kebahasaan itu hampir tidak terelakkan. Karena sifatnya yang dinamis, letak pendulum itu sendiri tidak akan secara permanen berada di suatu tempat. Jika dia telah mentok pada suatu sisi ayunannya, dia akan bergerak lagi ke arah sisi yang lain, untuk akhirnya sampai pada titik perimbangan (baru) yang lebih mantap dan kurang lebih permanen. Dan berkenaan dengan gerak pendulum perkembangan kebahasaan nasional dengan pola sekitar Sriwijaya Majapahit itu, titik perimbangan baru tersebut tentunya merupakan hasil akhir tarik-menarik antara keduanya, sehingga dia akan berayun secara stabil dan berimbang sekitar pertengahan

antara keduanya pula. Tetapi, karena situasi yang *given* sekarang ini ialah Indonesia modern, ada faktor ketiga yang akan ikut sangat menentukan, yaitu kemodernan itu sendiri dengan etos-etosnya dan nilai-nilainya. Maka pengaruhnya kepada proses mencapai perimbangan baru tersebut akan sedikit banyak lebih mengarah ke sisi pola Sriwijaya dengan dukungan pola-pola budaya pantai, termasuk budaya pantai Jawa sendiri, dan dengan kekayaan oleh unsur-unsur modernitas yang lebih universal. Inilah yang tampaknya akan terwujud, lambat atau cepat.

Pola perkembangan keislaman di negeri kita adalah sepenuhnya sejajar dan analog dengan pola pertumbuhan kebahasaan itu, sebagai unsur pertumbuhan dinamis penampilan nilai keindonesiaan kita yang utuh. Telah dikatakan, kita perlu mampu memandangnya secara wajar, tanpa harapan berlebihan dari mereka yang menyambutnya, tapi juga tanpa ketakutan berlebihan dari mereka yang mengkhawatirkannya. Prosesnya belum selesai, dan memang ada “tangan gaib” yang sangat menentukan bentuk dan hasil proses itu. Mereka yang kenal akan format tertentu melalui *window* tertentu akan dapat membukanya dan mampu “mengeditnya”, (untuk meminjam jargon komputer) sehingga bisa mengarahkan, sekurangnya menduga, ke mana semuanya ini menuju. Dan sudah diingatkan bahwa kalau salah menilainya, sebuah gejala positif akan berubah menjadi sinyal palsu yang mencelakakan, sekurangnya membuat yang bersangkutan kecele dan kecewa. [❖]